

## **UPAYA KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN AKSES PENDIDIKAN DASAR**

Rizki Ananda<sup>1</sup>, Husnul Latifah<sup>2</sup>, Aura Afrillia Anry<sup>3</sup>, Jihan Ashilah<sup>4</sup>, Ahmad Rifaldi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

<sup>1</sup>rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id

### **ABSTRACT**

*This article discusses the policies and issues related to access to basic education in Indonesia, which is a crucial aspect of national development. Education serves to develop human potential and improve the quality of human resources. Although the government has implemented various policies, challenges such as curriculum relevance, unequal distribution of teachers, and limited ongoing training continue to hinder the achievement of national education goals. Through a literature review approach, this article identifies the root causes and contributing factors to the low quality of education, including structural issues, human resources, and socio-cultural factors. Strategic recommendations are proposed to improve education quality, such as enhancing curriculum relevance, equalizing teacher distribution, and reducing administrative burdens. With the implementation of appropriate policies, it is expected that access to and the quality of basic education in Indonesia can improve significantly.*

*Keywords: policy, access issues, basic education*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas kebijakan dan permasalahan akses pendidikan dasar di Indonesia, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, tantangan seperti relevansi kurikulum, distribusi guru yang tidak merata, dan minimalnya pelatihan berkelanjutan masih menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Melalui pendekatan studi pustaka, artikel ini mengidentifikasi

akar permasalahan serta faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan, termasuk aspek struktural, sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya. Rekomendasi strategi disusun untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti peningkatan relevansi kurikulum, pemerataan distribusi guru, dan pengurangan beban administratif. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, diharapkan akses dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

Kata Kunci: kebijakan, permasalahan akses, pendidikan dasar

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan memegang peran krusial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu didorong untuk mengembangkan kemampuannya melalui proses pembelajaran atau metode lain yang diakui secara sosial. Selain itu, pendidikan juga menjadi indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warganya.

Istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani *polis*, yang berarti kota, dan berkaitan erat dengan konsep pengelolaan dalam sebuah organisasi (Kiwang et al., 2014). Secara umum, kebijakan merupakan tindakan formal yang dijalankan oleh suatu lembaga, terutama pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan

tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan juga dapat dipahami sebagai keputusan resmi yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku secara menyeluruh bagi masyarakat (Nasarudin, 2016).

Arah dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam sistem pendidikan nasional. Sistem ini mencakup seluruh elemen dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Hakim, 2016). Tujuan ini ditetapkan melalui kebijakan pendidikan, yang terus mengalami perubahan dan penyesuaian agar mencerminkan jati diri bangsa. Salah satu tonggak penting dalam kebijakan pendidikan Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam mewujudkan tujuan

pendidikan melalui kebijakan yang terstruktur dan berorientasi pada mutu.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menelaah literatur yang telah terpublikasi baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setiap sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, keandalan, serta kontribusinya terhadap pembahasan pokok dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan pendapat para ahli, mengidentifikasi pola pemikiran, serta menarik kesimpulan yang mendukung perumusan teori atau kerangka berpikir.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan kajian yang kaya secara konseptual serta memperkuat argumen dengan dasar teoritis yang kokoh.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kebijakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar: Apa Yang Salah Dan Bagaimana Memperbaikinya?**

Guru Sekolah Dasar di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menghambat kualitas pendidikan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Kurangnya Relevansi Kurikulum:
  - a) Kurikulum terlalu teoretis dan kurang menekankan pada keterampilan praktis seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas yang dibutuhkan di dunia kerja.
  - b) Materi pelajaran seringkali tidak relevan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari, sehingga sulit bagi

siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata

- c) Kurangnya fleksibilitas kurikulum dalam mengakomodasi perbedaan individual siswa, baik dari segi gaya belajar maupun latar belakang sosial ekonomi.

## 2. Distribusi Guru yang tidak merata:

- a) Kekurangan guru yang berkualitas, terutama di daerah terpencil, sehingga siswa di daerah tersebut seringkali kekurangan akses terhadap pembelajaran yang efektif.
- b) Beban kerja guru di daerah terpencil cenderung lebih tinggi karena mereka harus mengajar berbagai mata pelajaran dan seringkali juga merangkap sebagai tenaga administrasi.

- c) Kurangnya insentif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil, seperti tunjangan yang memadai dan fasilitas yang layak.

## 3. Minimnya Pelatihan Berkelanjutan:

- a) Frekuensi pelatihan yang tidak teratur dan materi pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan guru di lapangan.
- b) Kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan dan sumber daya pembelajaran yang berkualitas.
- c) Kurangnya dukungan dari sekolah dan pemerintah dalam pengembangan profesional guru.

## 4. Beban Administrasi yang Berlebihan

- a) Banyaknya tugas administratif yang tidak langsung terkait dengan proses pembelajaran, seperti pengisian

laporan, membuat program tahunan, dan mengurus administrasi siswa.

- b) Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal dalam mengelola data administratif, sehingga menyita banyak waktu guru.
- c) Kurangnya dukungan dari pihak sekolah dalam meringankan beban administrasi guru, misalnya dengan menyediakan tenaga administrasi yang memadai.

5. Kondisi Fisik Sekolah yang Kurang Memadai:

- a) Ruang kelas yang sempit dan tidak nyaman, fasilitas belajar yang rusak, dan kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran seperti perpustakaan dan laboratorium.
- b) Kurangnya ketersediaan sumber daya

pembelajaran yang berkualitas, seperti buku teks, media pembelajaran, dan alat peraga.

6. Peran Orang Tua yang Minim:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga sulit bagi mereka untuk memberikan dukungan yang memadai bagi pembelajaran anak di rumah.
- b) Dalam kegiatan sekolah, kurangnya keterlibatan peran orang tua. Seperti rapat orang tua atau kegiatan ekstrakurikuler.

**Akar Permasalahan**

Kualitas pendidikan, khususnya di jenjang sekolah dasar di Indonesia, merupakan isu krusial yang menjadi sorotan berbagai pihak. Sejumlah riset dan hasil observasi di lapangan mengindikasikan adanya hambatan yang cukup kompleks dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Permasalahan ini bukanlah satu dimensi, melainkan hasil interaksi

dari beragam aspek yang saling memengaruhi, mulai dari kebijakan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, hingga aspek sosial dan budaya yang memengaruhi semangat belajar siswa.

Agar dapat menemukan solusi yang tepat guna dan berjangka panjang, penting bagi kita untuk menelusuri akar penyebab dari rendahnya mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar. Pemahaman yang mendalam atas akar permasalahan ini akan memungkinkan kita merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih akurat dan berdampak nyata terhadap perbaikan pendidikan nasional.

Faktor-Faktor Utama Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan Dasar:

#### 1. Aspek Struktural

- Kebijakan Pendidikan: Masih lemahnya evaluasi dan pembaruan regulasi pendidikan serta kurangnya sinergi antarinstansi yang berkaitan.

- Pengelolaan Anggaran: Pendanaan pendidikan belum mencukupi dan distribusinya tidak merata di berbagai wilayah.
- Sarana Prasarana: Banyak sekolah mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti ruang belajar yang tidak layak, peralatan yang rusak, dan akses yang terbatas terhadap teknologi pendidikan.

#### 2. Aspek Sumber Daya Manusia

- Kompetensi Guru: Jumlah pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik dan profesionalisme tinggi masih terbatas.
- Penyebaran Guru: Ketidakseimbangan distribusi tenaga pengajar, terutama di daerah-daerah terpencil.
- Beban Kerja: Banyak guru terbebani dengan

tugas di luar mengajar, yang mengurangi fokus mereka dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran secara optimal.

### 3. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

- Keselarasan Kurikulum: Isi kurikulum kurang mencerminkan kebutuhan nyata siswa maupun dunia kerja masa depan.
- Strategi Mengajar: Pembelajaran masih didominasi pendekatan konvensional yang pasif dan kurang mendorong keterlibatan aktif siswa.
- Sistem Penilaian: Mekanisme evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan capaian dan perkembangan belajar siswa secara menyeluruh.

### 4. Faktor Sosial dan Budaya

- Ketimpangan Sosial Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga memengaruhi akses siswa terhadap fasilitas belajar dan motivasi belajar mereka.

- Lingkungan Rumah: Minimnya dukungan dari keluarga dalam proses pendidikan menghambat kemajuan akademik siswa.

- Pandangan Masyarakat: Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah di sejumlah komunitas.

### 5. Teknologi Pendidikan

- Akses Terbatas: Banyak sekolah yang hingga kini masih belum memperoleh akses yang layak terhadap teknologi informasi.

- Pemanfaatan yang Rendah: Guru belum sepenuhnya menggunakan teknologi secara efektif dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan memahami berbagai akar persoalan tersebut, langkah-langkah solutif yang lebih tepat sasaran dapat dirancang. Misalnya, bila persoalan utama berada pada kompetensi guru, maka program pelatihan intensif dan pemberian insentif menjadi langkah awal yang sangat penting.

### **Kebijakan Yang Relevan Dan Aplikatif Untuk Mengatasi Tantangan**

Mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh Prof. Budi Santosa dari Universitas Indonesia (2020), terungkap bahwa lemahnya kemampuan pedagogik guru menjadi faktor signifikan yang menghambat kualitas pembelajaran. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah yang pasif, yang tidak cukup merangsang daya pikir kritis maupun kreativitas peserta didik. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, lembaga pelatihan, maupun masyarakat.

Rekomendasi Solusi Strategis:

#### **1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Kurikulum**

- Libatkan guru dalam penyusunan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan realitas siswa.
- Terapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pada kreativitas, kolaborasi, serta pemikiran kritis.
- Gunakan teknologi digital untuk mendukung dan memperkaya proses belajar mengajar.

#### **2. Pemerataan Guru yang Berkualitas**

- Berikan insentif finansial dan non-finansial yang menarik untuk guru yang bersedia mengajar di daerah tertinggal.
- Perluas akses beasiswa bagi calon pendidik yang bersedia bertugas di wilayah kekurangan guru.
- Rancang program pengembangan karir guru untuk

meningkatkan motivasi dan profesionalisme.

### 3. Penguatan Pelatihan Guru Berkelanjutan

- Tawarkan pelatihan yang selaras dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk pengelolaan kelas dan integrasi teknologi.
- Sediakan akses terhadap platform pelatihan daring dan komunitas belajar guru.
- Berikan penghargaan bagi guru yang aktif meningkatkan kapasitas dirinya melalui pelatihan.

### 4. Pengurangan Beban Administratif

- Terapkan sistem digital untuk mengelola urusan administrasi sekolah secara otomatis.
- Kurangi birokrasi dan penyederhanaan pelaporan agar guru bisa lebih fokus mengajar.

- Sediakan tenaga administrasi tambahan untuk mendukung tugas-tugas non-pengajaran.

### 5. Peningkatan Fasilitas Sekolah

- Pastikan pendanaan memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
- Galang partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan sekolah.

### 6. Mendorong Partisipasi Orang Tua

- Adakan kegiatan bersama yang melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pendidikan anak.
- Selenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk memperkuat peran orang tua sebagai mitra pendidikan.

## 2. Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan

### 1) Analisis Kebijakan Publik

Menurut Elau dan Kenneth Prewitt sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones dalam karya Suharno, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang bersifat menetap dan tercermin dalam tindakan yang berulang dan konsisten, baik oleh pihak pembuat maupun pelaksana kebijakan. Sementara itu, Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang disusun oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam prosesnya, kebijakan juga memperhitungkan hambatan yang ada dan mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, W.I. Jenkins, seperti dikutip oleh Sholichin Abdul Wahab, mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang saling berkaitan dan diambil oleh aktor politik atau kelompok politik dalam menentukan tujuan dan cara mencapainya dalam situasi tertentu, dengan asumsi bahwa keputusan tersebut berada dalam kewenangan aktor tersebut.

### **1) Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan**

Pada fase penyusunan agenda kebijakan, terdapat tiga langkah penting yang perlu dilakukan:

1. Membangun kesadaran di antara pemangku kepentingan bahwa suatu fenomena merupakan masalah yang perlu ditangani. Ini penting karena tidak semua pihak memiliki persepsi yang sama terhadap suatu isu.
2. Menentukan batasan masalah yang akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah bersifat mendesak atau penting.
3. Menggalang dukungan agar isu yang diangkat dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yang dapat dilakukan melalui pengorganisasian kelompok masyarakat, dukungan politik, serta publikasi di media.

### **Analisis Kebijakan**

Anggaran pendidikan termasuk dalam ranah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan arti dan lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatannya. Dari sisi makna, kebijakan publik mencerminkan keputusan pemerintah terkait hal-hal yang dilakukan atau diabaikan. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan anggarannya harus menjunjung prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, yang menekankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan agar tidak tertinggal dalam perkembangan informasi. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, agar pelaksanaan anggaran daerah dapat berjalan efektif. Meskipun anggaran pendidikan terus meningkat tiap tahun, dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya optimal.

Secara esensial, pendidikan adalah proses peningkatan kualitas

hidup dan pembentukan kepribadian. Pendidikan membantu manusia memahami makna hidup dan meningkatkan harkat serta martabatnya. Pendidikan bermutu ditandai dengan kemampuan membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, kelemahan, dan ketidakjujuran, serta ditopang oleh sistem perencanaan, tata kelola, dan tenaga pendidik yang baik.

John Dewey mengartikan pendidikan sebagai suatu proses pengembangan kemampuan intelektual dan emosional individu melalui interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki spiritualitas, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan nasional berfungsi membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat serta bertujuan mencetak manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri, dan

demokratis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah memiliki peran dalam mengarahkan, membimbing, serta mengawasi pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang baik dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu:

1. Pendidikan harus dijalankan secara adil dan demokratis, bebas dari diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, dan keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Diselenggarakan sebagai suatu sistem yang terpadu dan terbuka, pendidikan menjadi proses pembentukan karakter dan pemberdayaan peserta didik yang berkelanjutan sepanjang hidup.
3. Proses pembelajaran bertujuan untuk memberikan keteladanan, menumbuhkan semangat belajar, serta mendorong kreativitas peserta didik.
4. Pendidikan mendorong terciptanya budaya literasi,

termasuk kebiasaan membaca, menulis, dan berhitung di kalangan seluruh lapisan masyarakat.

5. Penyelenggaraan pendidikan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan menekankan peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasan mutu layanan pendidikan.

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai positif, tetapi juga dikembangkan sebagai wahana pemberdayaan potensi peserta didik, sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan tuntutan dalam aspek keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan bidang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, misi yang ditetapkan oleh pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya akses yang merata dan luas terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2. Mendukung dan memfasilitasi pengembangan potensi anak

bangsa secara menyeluruh, dimulai sejak usia dini hingga sepanjang hayat, guna membangun budaya masyarakat yang gemar belajar.

3. Meningkatkan kualitas input dan proses pendidikan untuk membentuk pribadi peserta didik yang memiliki moral dan karakter yang kuat.
4. Memperkuat profesionalisme serta tanggung jawab Institusi pendidikan berfungsi sebagai tempat pengembangan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, serta nilai-nilai yang berlandaskan pada standar nasional serta internasional.
5. Mengoptimalkan keterlibatan Peran masyarakat dalam proses pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian, yang tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna merealisasikan misi tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menetapkan berbagai strategi dan program yang dirancang berdasarkan skala prioritas tertentu. Salah satu

bentuk prioritas tersebut tercermin dalam pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN/APBD, serta partisipasi dana dari masyarakat, yang diarahkan pada beberapa aspek utama berikut ini:

1. Memperluas jangkauan dan memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing hasil pendidikan.
3. Memperbaiki tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik dalam pengelolaan pendidikan.

## **Realisasi Anggaran di Sektor Pendidikan**

### **1) Definisi Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana kerja organisasi untuk periode mendatang yang disusun secara sistematis, terukur, dan disajikan dalam bentuk angka secara formal. Secara umum, anggaran mencerminkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Proses penyusunannya dikenal sebagai penganggaran. Dalam anggaran, rencana kerja dirumuskan melalui angka-angka yang mewakili

target yang ingin dicapai. Penyajian dalam format numerik ini memudahkan seluruh anggota organisasi untuk memahami tujuan yang hendak diraih dalam jangka waktu tertentu. Anggaran tersebut mencerminkan sasaran resmi organisasi yang harus dicapai bersama oleh seluruh elemen di dalamnya.

## **2) Karakteristik Anggaran**

Anggaran memiliki dua elemen pokok, yaitu pendapatan dan belanja. Bagian pendapatan menunjukkan total dana yang diperoleh oleh suatu lembaga dari berbagai sumber. Sementara itu, bagian belanja menggambarkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung setiap komponen program yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, istilah yang umum dipakai untuk menyebut pengeluaran anggaran antara lain mencakup dana operasional serta dana investasi, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk aset atau belanja modal.

## **3) Fungsi Anggaran**

Anggaran, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan

pengendalian dalam manajemen, juga berperan sebagai sarana bagi manajemen untuk memposisikan organisasi dalam keadaan yang kuat atau lemah.

Menurut Deddy Nordiawan, beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

### **a) Anggaran sebagai Sarana Perencanaan**

Dengan fungsi ini, organisasi dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan.

### **b) Anggaran sebagai Alat Pengendali**

Anggaran berperan penting dalam membantu instansi sektor publik agar terhindar dari pemborosan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.

### **c) Anggaran sebagai Instrumen Kebijakan**

Anggaran memungkinkan lembaga sektor publik untuk menentukan arah dan strategi kebijakan yang akan dijalankan.

d) Anggaran sebagai Instrumen Politik

Anggaran menjadi cerminan dari komitmen para pengambil keputusan dalam melaksanakan program-program yang telah disetujui secara resmi.

e) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dengan adanya dokumen anggaran yang lengkap, setiap bagian atau unit dalam organisasi dapat memahami tanggung jawabnya serta mengetahui peran unit lainnya.

f) Anggaran sebagai Ukuran Kinerja

Anggaran juga digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah sebuah unit kerja telah memenuhi sasaran yang ditetapkan, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun efisiensi biaya.

g) Anggaran sebagai Alat Pemicu Semangat Kerja

Anggaran dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian tujuan, di mana nilai-nilai yang tercantum menjadi sasaran yang harus dicapai oleh

individu maupun tim dalam organisasi.

Agar efektif sebagai motivasi, anggaran harus menantang namun tetap realistis, yaitu tidak terlalu tinggi hingga mustahil tercapai, dan tidak terlalu rendah sehingga mudah tercapai tanpa usaha maksimal.

### **Anggaran di Sektor Pendidikan**

Anggaran pendidikan merujuk pada alokasi dana yang ditujukan untuk sektor pendidikan, baik melalui kementerian/lembaga negara maupun transfer ke daerah, termasuk untuk gaji pendidik. Namun, ini tidak mencakup anggaran pendidikan kedinasan, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49, diamanatkan bahwa dana pendidikan, selain untuk gaji pendidik dan biaya kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Pendanaan pendidikan berasal dari berbagai sumber, Pendanaan pendidikan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah,

yayasan, orang tua, dan unsur lainnya. Sumber dana dari pemerintah dibedakan ke dalam tiga level, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan dana yang dikelola oleh daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan anggaran pendidikan dibagi antara dana yang langsung ditangani oleh pemerintah pusat dan dana yang dikirimkan ke daerah dalam bentuk transfer. Dana transfer ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta tambahan DAU dan dana otonomi khusus di sektor pendidikan. Setiap daerah memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan kegiatan pendidikan di wilayahnya pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK agar siswa dapat memperoleh manfaat pendidikan. Dalam perencanaan anggaran, penting untuk memperhatikan kebutuhan dana berdasarkan data yang akurat tentang jumlah siswa pada setiap tingkat satuan pendidikan, pengelolaan dana

perlu dilakukan secara tepat agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

Dengan adanya peningkatan dalam alokasi anggaran pendidikan, diharapkan sistem pendidikan nasional dapat mengalami perbaikan yang signifikan, termasuk dalam hal pembaruan visi, misi, serta strategi pembangunan pendidikan. Visi pendidikan nasional sendiri diarahkan untuk membangun sistem yang kokoh dan kredibel, yang mampu memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi individu berkualitas dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, Pasal 31 Ayat (4) menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan kualitas dan layanan pendidikan akan meningkat, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Anggaran yang

bersumber dari rakyat berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari peran anggaran. Agar anggaran dimanfaatkan secara maksimal, penting untuk menjalankan seluruh tahapan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan—khususnya di sektor pendidikan—dilakukan guna menjamin bahwa alokasi dana dilakukan secara adil dan seimbang sesuai kebutuhan.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilakukan secara tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, ekonomi, dan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Pembiayaan pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Adanya pembagian peran yang jelas antara

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan membantu meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan. Pengalokasian dana secara adil dan tepat sasaran menjadi faktor kunci dalam mendukung penggunaan anggaran yang efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembiayaan pendidikan diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang mencakup berbagai ketentuan yang meliputi hal-hal berikut:

1. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Sumber dana pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan kebutuhan.
3. Pengelolaan dana pendidikan harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik.
4. Meskipun alokasi anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun, terdapat perbedaan dalam hasil dan pencapaian yang diperoleh.

Beberapa kabupaten masih tertinggal, sementara kabupaten lainnya berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Mengetahui pola belanja pemerintah di level kabupaten atau kota serta keterkaitannya dengan input dan output di sektor pendidikan merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan demi meningkatkan mutu capaian pendidikan (Bank Dunia, 2008).

#### **D. Kesimpulan**

Permasalahan akses dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia, yang merupakan kunci untuk pembangunan sumber daya manusia. Meskipun terdapat kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan, berbagai tantangan seperti relevansi kurikulum, distribusi guru yang tidak merata, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan masih menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Analisis menunjukkan bahwa faktor struktural, sumber daya manusia, kurikulum, dan faktor sosial

budaya berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pendidikan. Strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan mutu kurikulum, pemerataan distribusi guru, pengurangan beban administratif, dan peningkatan fasilitas sekolah.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan dasar dapat ditingkatkan, memberikan akses yang lebih baik bagi semua siswa serta mendukung perkembangan pada pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921.
- Hasibuan, R. T., & Martha, A. (2025). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR : APA YANG SALAH DAN*

BAGAIMANA  
MEMPERBAIKINYA ? PRIMARY  
SCHOOL TEACHER  
EDUCATION POLICY : WHAT ' S  
WRONG AND HOW TO FIX IT ?  
445–453.

*Tantangan* . Surabaya: Penerbit  
Universitas Airlangga.

Indonesia, U. P. (2017). Analisis  
Kebijakan Pendidikan Mengenai  
Pengembangan Dan  
Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal  
Penelitian Pendidikan*, 17(2),  
158–166.

Khaulani, F., Marsidin, S., & Sabandi,  
A. (2020). Analisis Kebijakan dan  
Pengelolaan Pendidikan Dasar  
terkait Standar Isi di Sekolah  
Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu  
Pendidikan*, 2(2), 121–127.

Kiwang, R., dkk. (2014). *Pendidikan  
dan Kebijakan: Analisis dan  
Implementasi* . Jakarta: Penerbit  
Pendidikan.

Ramdhani, M., & Ramdhani, A.  
(2017). *Kebijakan Pendidikan di  
Indonesia: Teori dan Praktik* .  
Yogyakarta: Penerbit UAD.

Nasarudin, A. (2016). *Dasar-Dasar  
Kebijakan Publik* . Bandung:  
Penerbit Alfabeta.

Hakim, F. (2016). *Sistem Pendidikan  
Nasional: Kebijakan dan*